

Kios Depan My Mart Wajib Dikosongkan

Sambungan dari hal 9

Sementara itu, Kabid Ketertamanan dan Ketertibhan Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan bahwa proses penertiban kios-kios tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dimana sebelumnya, pihaknya telah melayangkan surat permintaan untuk pengosongan kios kepada puluhan pedagang. "SP 3 sudah kami layangkan, beberapa hari lalu kami juga mengirimkan surat permintaan pengosongan," ujar Imam.

Menurut dia, pedagang yang menempati kios-kios tersebut tak perlu membongkar bangunan. Mereka cukup mengosongkan kios tersebut karena merupakan aset negara. "Beberapa waktu lalu kami kebobolan tiga kios dibongkar habis. Padahal itu aset negara. Pedagang cukup mengosongkan," tegasnya lagi.

Masih kata Imam, tim terpadu memberi batas waktu hingga 10 Maret agar seluruh pedagang mengosongkan kios. Jika lewat, maka tim terpadulah yang akan menertibkan. "Jadi kami kasih waktu sampai tanggal 10 Maret. Setelah semuanya kosong baru ada pembongkaran," jelasnya.

Bangunan Liar hingga ke Row Jalan

Row Jalan

Sementara itu, pembangu-

nan kios liar makin sulit ditangani. Seperti di sekitar Pasar Seken Aviari, Batuaji. Bahkan, Camat Kecamatan Batuaji yang saat itu dijabat Fridkalter sudah melarang agar tak membangun kios lagi di lokasi yang terbakar beberapa bulan lalu, tapi sejumlah pedagang masih tetap nekat. Bangunan mereka melebar hingga ke ROW jalan Perumahan Pemda II. Sayangnya, hingga kini belum ada tinakan lagi dari pihak kecamatan, bahkan terkesan membiarkan.

Pantauan di lapangan, saat ini kios semi-permanen sudah berdiri di lokasi. Para pedagang mengaku kembali membangun karena memang belum ada tindakan dari instansi pemerintah terkait. "Kalau mereka dibiarkan, ya kami bangun lagi (di lokasi kebakaran)," ujar Reni, seorang pedagang di lokasi bekas kebakaran tersebut, kemarin.

Selama ini diakui Reni memang ada teguran dan imbauan dari pihak kecamatan untuk tidak lagi membangun di lokasi yang sama. Namun karena belum ada tindakan tegas mereka akhirnya kembali memanfaatkan lahan row jalan itu. "Kapan-kapan lah itu baru ditertibkan. Sekarang kami pakai dululah," ujarnya santai.

Mereka bahkan berharap

agar lokasi sekeliling pasar tersebut juga dilegalkan sebagai tempat jualan barang bekas mereka. "Apalagi mau dijadikan ikon (pariwisata) Batam. Ya siapa yang nggak mau berdagang di sini," ujar Fadil, pedagang lainnya.

Permintaan para pedagang itu bertentangan dengan wacana Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebelumnya. Lokasi pasar seken itu akan ditata ulang dan lahan penghijauan akan dibersihkan dari bangunan apapun agar dijadikan taman. Namun wacana itu masih sebatas wacana, sebab belum terealisasi hingga saat ini.

Pihak Kecamatan Batuaji saat dikonfirmasi enggan memberikan respon. "Belum ada arahan lagi (kapan akan ditertibkan). Selama ini sudah kami peringati tapi mereka tetap bangun," ujar Camat Batuaji Ridwan.

Bangunan Liar Menjamur

Di lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Seibeduk, bangunan liar juga semakin menjamur. Sejumlah titik kios dan rumah liar hampir tersebar di setiap kelurahan, salah satunya di Kelurahan Mangsang. Pantauan *Batam Pos*, kios liar terlihat berderet di jalan pintu satu hingga pintu tiga Mangsang. Bangunan liar itu

terlihat berjejer menempati row jalan serta menutupi drainase. Banyak warga yang menyalahgunakan row untuk kepentingan pribadi seperti membangun tempat usaha, mulai dari toko kelontong, tempat laundry hingga depot air minum.

Sebelumnya Camat Seibeduk Science Taufik Hiyadi mengklaim pihak kecamatan terus melakukan pengawasan, ia bahkan mengklaim telah bekerjasama dengan RT/RW. "Kalau ada yang baru, kami harap peran serta masyarakat, informasikan ke kami," ujar Science belum lama ini.

Lokasi lain yakni terlihat di Bukit Mangsang, atau berada di sekitar Perumahan Puri Agung IV. Hampir puluhan rumah liar berdiri di bukit tersebut. "Semakin hari semakin banyak penghuninya. Warga yang digusur pindah di sana," ujar Rahmawati, warga Seibeduk.

Demikian juga terlihat di sisi Perumahan Puri Agung IIa. Lapak kios terlihat bertambah. Pemilik kios itu menempati bangunannya untuk berjualan pakaian seken dan buah-buahan. "Ya beginilah kalau gak sanggup bayar ruko, bisanya jualan di kios-kios liar," kata Sarifa, pemilik kios liar. (she/une/eja/mta)

Ibu Hamil Dites HIV/AIDS

SEKUPANG (BP) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam akan melakukan tes *Human Immunodeficiency Virus Infection dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* terhadap ibu hamil. Pemeriksaan serupa juga akan dilakukan pada wanita pekerja seks (WPS).

"Ini bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam mendeteksi dini penderita HIV/AIDS," ujar Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Senin (5/3).

Ia mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan dengan pengambilan darah dan *Voluntary Counselling and Testing (VCT)* hingga pemberian konseling mengenai HIV/AIDS. "500 ibu hamil dan 500 WPS yang akan kami ambil sampelnya," sebut Didi.

Ia menjelaskan, *Prevention Mother to Child Trans*



F. DALIL HARAHAP/BP

Didi Kusmarjadi

Ibu Hamil Dites HIV/AIDS

Sambungan dari hal 9

mission (PMTCT) atau pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi yang dikandungnya merupakan salah satu upaya dalam menyelamatkan bayi dari penularan virus mematikan ini.

"Tes ini bisa meminilisir bayi terkena virus HIV/AIDS jika ibunya positif. Seperti tindakan dini, jadi kami bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan bayi," jelas mantan Direktur RSUP Kepri ini.

Didi menyebutkan, tahun 2017 lalu sedikitnya tiga balita ditemukan positif mengidap HIV/AIDS. Untuk itu pemeriksaan terhadap ibu hamil ini sangat penting.

Selain ibu hamil, menurut Didi, WPS termasuk salah satu yang berisiko tinggi terkena penularan HIV/AIDS. "Karena aktivitas mereka sangat rentan penularan virus mematikan ini," ujarnya lagi.

Tes HIV/AIDS akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.

Total Rp 80 juta yang *disiapa-*kan. Untuk waktu dan lokasi tes WPS pihaknya masih mendata WPS yang akan menjalani tes. "Tim masih mendata, tapi kemungkinan sama dengan yang sebelumnya seperti (lokalisasi) Sintai, hotel, tempat pijat," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinkes Batam pada 2017, sedikitnya 624 WPS menjalani tes HIV/AIDS. Dari hasil pemeriksaan tersebut tiga di antaranya dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS. (yui)

PEGAWAI Kecamatan Sagulung, Alafajri dan Rahman menyusun e-KTP dan KK yang sudah siap akan dibagikan ke warga, Senin (5/3). Sebanyak 18.000 KTP belum dicetak karena tidak adanya blangko e-KTP. Warga yang mau mengurus berkas lain kesusahan karena tidak memiliki e-KTP.



F. DALIL HARAHAP/BATAM, POR

18 Ribu E-KTP Belum Dicitak

Sudah Rekam sejak 2016

SAGULUNG (BP) - Meski Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan blangko e-KTP kini melimpah, sehingga tak ada lagi alasan daerah tidak mencetak e-KTP warganya, namun kenyataan itu berbeda di Batam. Banyak masyarakat Batam yang sudah lama rekam e-KTP namun tak kunjung dicetak.

Di Kecamatan Sagulung contohnya, ada 18 ribu warga yang e-KTPnya belum rampung dicetak. Hal itu diakui Camat Sagulung Reza Khadafi. Dia mengatakan penumpukan berkas e-KTP itu dikarenakan kekurangan blangko. "Blangko dari pusat belum datang, kemarin Disdukcapil sudah ajukan untuk kecamatan Sagulung," ujar Reza, Senin (5/3).

Ia mengatakan, penumpukan berkas e-KTP di wilayahnya memang yang paling banyak. Dia berharap warga yang sudah melakukan perekaman sejak tahun 2016 dan 2017 untuk bersabar.

Disinggung terkait kapan ribuan e-KTP itu dicetak, Reza belum bisa memastikan. Sebab, pemerintah pusat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam masih

berupaya keras untuk mendatangkan blangko e-KTP sebanyak mungkin, sesuai dengan permintaan di Batam secara umumnya.

"Kita tunggu saja. Atau lebih jelasnya langsung koordinasi dengan Disdukcapil karena pencetakan e-KTP dilakukan di sana," jelasnya.

Sementara itu, warga yang menantikan e-KTP kembali mendatangi kantor Kecamatan. Mereka menanyakan kepastian kapan e-KTP mereka bisa dicetak dan dibagikan. "Dari tahun 2016 e-KTP saya belum jadi," keluh, Rosmila, warga Sagulung.

Selain menanyakan kepastian e-KTP, warga lain juga terlihat mengantri mengurus berkas e-KTP. "Lumayan banyak. Sehari bisa 30 hingga 50 orang yang mengurus berkas," ujar Reza lagi.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar mengklaim sudah menyelesaikan pencetakan e-KTP untuk kecamatan Batamkota. Dalam minggu ini, pihaknya mencoba menyelesaikan untuk mencetak KTP elektronik wilayah Sagulung.

"Saya sebutkan urutannya yang sudah itu, Bulang, Galang,

Belakangpadang, Nongsa, Batuaji, Batamkota. Dan ini sedang mengerjakan untuk Sagulung," katanya, Senin (5/3).

Ia mengatakan, pihaknya mengklaim akan sesuai target yang diberikan Wali Kota Batam ke Disdukcapil Kota Batam yakni menyelesaikan seluruh pencetakan e-KTP elektronik paling lambat Mei mendatang. "Targetnya begitu, kalau perlu kami akan lembur," tuturnya.

Khaidar mengaku ikut merasakan keresahan masyarakat. Di satu sisi, ia juga mengapresiasi kesabaran masyarakat sampai saat ini. "Kemarin ini karena blangko tak ada. Sekarang sudah ada, jadi kami usahakan mencetaknya secepat mungkin," ucapnya.

Ia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir lagi tentang blangko. Karena saat ini blangko yang tersedia sangat cukup. "Kalau kurang kami tinggal minta lagi, dan cepat dikasih," tuturnya.

Camat Batamkota Mohammad Fairus Batubara menuturkan, sebanyak 5 ribu e-KTP sudah tercetak. Proses distribusinya juga sudah berjalan. "Yang belum dicetak juga masih ada. Tapi tidak tahu berapa, saya tak pegang datanya," ujarnya. (ska/une)

Harga Cabai Masih Tinggi

Mahal dari Daerah Penghasil

YASHINTA-YULIANTI, Batamkota

KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Zarefriadi tak membantah jika harga komoditas pokok di Batam masih tinggi. Seperti, harga cabai yang masih berada di angka Rp 50 ribu per kilogram (kg). "Dari daerah penghasil saja seperti Jambi sudah tinggi, per kilogramnya Rp 25 ribu," kata Zaref, Senin (5/3).

Dikatakannya, Batam hanya bisa menerima harga yang dibanderol daerah penghasil. Itu karena Batam bukanlah daerah penghasil dan hanya mendapat suplai komoditas dari daerah lain.

"Beda kalau Batam daerah penghasil, pastinya harga bisa dikendalikan," ujar Zaref.

Menurut dia, harga jual di Batam pastinya sudah diperhitungkan oleh pemasok komoditas. Mereka harus memikirkan ongkos kirim, biaya penyusutan barang dan biaya lainnya. "Biasanya pengiriman lewat kargo pesawat, kalau lewat kapal pastinya lama sampai dan ditakutkan cepat busuk. Makanya harga tinggi," terang

Zaref. Meski begitu, pihaknya mengklaim tetap turun setiap hari untuk memantau harga-harga komoditas di berbagai pasar di Batam.

Sementara itu, pantauan *Batam Pos* di pasar tradisional Batam, Senin (5/3), harga cabai memang masih mahal. Cabai merah yang didatangkan dari Yogyakarta misalnya, dijual dengan harga Rp 52 ribu hingga Rp 54 ribu per kg.

Distributor cabai di pasar Sagulung, Robinson mengata-

kan bahwa harga cabai yang tak menentu disebabkan pasokan barang yang lambat. "Jika pesawat pengangkut cabai telat, terus stok di pasar kurang, hari itu juga harganya bisa naik," ujar Robinson, kemarin.

Dia mengatakan, harga cabai di pasaran Batam memang tidak menentu. Ia menyebutkan, dalam dua bulan belakangan ini saja, harga cabai sudah belasan kali naik dan turun. "Karena Batam ini barangnya di

datangkan dari luar. Apalagi cabai, jadi harap dimaklumi," katanya. Berbeda dengan pasar tradisional di Seibeduk. Harga cabai terpantau lebih tinggi yakni Rp 58 ribu per kg. "Pasokannya sedikit. Makanya mahal," ujar Tatang, pedagang sayur di Pasar Pancur.

Dia mengatakan, sebelumnya harga cabai sekitar Rp 50 ribu per kg. "Harga tak bisa diprediksi," jelasnya.

Demikian juga untuk harga cabai rawit merah yang masih

terbilang mahal. Sejumlah pedagang menjual cabai ini dengan harga Rp 70 ribu per kg, padahal dua minggu yang lalu masih Rp 55 ribu per kg. "Bawang putih juga naik dari harga Rp 20 ribu menjadi Rp 23 ribu per kg," sebutnya.

Sementara untuk harga daging ayam, sayuran, telur, dan ikan laut tidak mengalami kenaikan harga.

"Harga yang lain masih normal. Cabai yang (naiknya) paling mencolok," tutupnya. ***

RIA, pedagang sayur di Pasar Tos 3000 Jodoh menunjukkan cabai rawit, Rabu (4/1) lalu. Harga cabai di Batam tergolong fluktuatif karena tergantung dengan harga dari daerah pemasok.

R. CICEP MULYANA/BATAM POS



LINGKUNGAN

Minta PPNS DLH Turun

SAGULUNG (BP) - Proyek reklamasi di belakang Kaveling Melati, Kelurahan Seipelenggut, Sagulung menuai protes warga dan pihak Kecamatan Sagulung. Mereka khawatir aktivitas itu berdampak buruk bagi lingkungan dan menimbun bakau.

"Kami berharap agar PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera turun cek. Kalau punya izin silakan lanjut asalkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Tapi kalau belum ada (izin) harus dihentikan. Itu akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya," ujar Camat Sagulung Reza Khadafi, Senin (5/3). Reza sendiri mengaku sudah melihat langsung aktivitas proyek reklamasi itu dan secara kasat mata diakuinya memang akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Lokasi hutan bakau yang menjadi area resapan air jika ditimbun akan memicu terjadinya bencana banjir di sekitar wilayah Seipelenggut. Apalagi jika proyek tersebut juga menutup ataupun mempersempit sungai ataupun saluran drainase yang ada.

"Memang harus segera ditindaklanjuti. Itu lokasi resapan air. Jika tidak dipikirkan solusi lain akan berdampak nantinya. Wilayah ini jadi rawan banjir," tutur Reza.

Pihak proyek sendiri, kata Reza, sampai siang kemarin belum ada tanggapan apapun terkait persoalan itu. "Tidak pengaruh. Untuk apa juga jumpa sama pihak proyek nanti malah salah persepsi. Ini akan kami awasi terus. Kami berharap pihak DLH segera turun. Kalau tak punya izin segel. Tak ada cerita lain," tegas Reza.

Warga yang tinggal di sekitar lokasi reklamasi mengaku tak setuju dengan aktivitas proyek tersebut. Sebab, akan berdampak buruk bagi lingkungan tempat tinggal mereka. "Kalau itu ditimbun semua, tak ada lagi daerah resapan air. Bisa-bisa tenggelam rumah-rumah kami yang ada di sekitar sini," ujar Harun, warga Kaveling Bukit Melati.

Warga hanya ingin memastikan jika proyek tersebut tidak berdampak bagi lingkungan sekitar. Sehingga, mereka meminta agar instansi pemerintah terkait segera turun cek ke lokasi dan mempertanyakan legalitas perizinan proyek itu. "Jika tidak berizin harus dihentikan karena akan merusak lingkungan di sini," tutur Harun. (eja)